

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	3
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Warta Kota

# Sepanjang 2022 Tak Bangun Puskesmas

## ▶ PDI-P Protes Seharusnya Ada di Tingkat Kelurahan

### Palmerah, Warta Kota

Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta melayangkan protes kepada Pemerintah DKI Jakarta terkait pelayanan kesehatan.

Protes itu disampaikan saat rapat paripurna tentang pandangan umum fraksi-fraksi terhadap laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (LP2APBD) tahun anggaran 2022, Senin (24/7/2023).

"Tahun 2022 ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak membangun satupun Puskesmas di Ibu Kota. Padahal masih terdapat 15 kelurahan yang belum memiliki Puskesmas," kata anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Stephanie Octavia saat pembacaan pandangan umum PDIP.

Stephani merinci 15 kelurahan yang belum memiliki Puskesmas adalah Duri Selatan; Jembatan Lima; Karanganyar; Tangki; Gambir; Gunung Sahari Selatan; Cikini; Senen; Glodok; Gondangdia; Kebon Kacang; Kemayoran; Cipadak; Karet Semanggi dan Kebayoran Lama Selatan.

Kata Stephanie ketiadaan fasilitas kesehatan tingkat pertama akan menyulitkan masyarakat untuk memperoleh haknya. Harusnya, kata dia, pemerintah daerah memperhatikan hak-hak kesehatan masyarakatnya.

"Tentu hal ini menghambat masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dasar. Bagaimana pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022 dapat menanggulangi pelayanan kesehatan di 15 kelurahan tersebut. Mohon penjelasan," ujarnya.

### Akan Selesai 2026

Sementara itu Dinas Kesehatan DKI Jakarta menjawab kritik dari Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta soal ketiadaan Puskesmas di 15 kelurahan Jakarta.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinkes DKI Jakarta Ani Ruspitawati mengakui, 15 kelurahan di Jakarta memang belum memiliki Puskesmas. Namun dia mengingatkan, konsep dasar Puskesmas di Kementerian Kesehatan bukanlah tingkat kelurahan, tetapi kecamatan.

"Aslinya kalau kita lihat regulasi Kemenkes itu based-nya (dasarnya) kecamatan. Kemudian di DKI, memang kemudian dibuat supaya ada di tingkat kelurahan karena mengingat kepadatan penduduk DKI cukup tinggi," ujar Ani pada Selasa (25/7/2023).

Ani mengungkapkan, jika di satu lokasi kelurahan tidak memiliki Puskesmas maka akan dilayani oleh Puskesmas Kecamatan. Soalnya semua Puskesmas yang ada di tingkat kelurahan berada di bawah Puskesmas tingkat kecamatan.

"Betul memang ada beberapa kelurahan yang belum ada Puskesmas, tetapi di tempat-tempat yang belum ada Puskesmas kelurahan, biasanya ada mekanisme lain. Misal itu ada Pos Kesehatan yang dari petugas (Puskesmas) kecamatan yang akan datang ke situ setiap hari," kata Ani.

Meski demikian, kata Ani, Pemerintah DKI tetap berencana membangun Puskesmas kelurahan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang kesehatan dasar. Sejauh ini kendala yang dihadapi Dinkes beragam, namun yang utama adalah keterbatasan lahan untuk pembangunan Puskesmas.

"Ada di perencanaan anggarannya, tahun ini kalau nggak salah ada beberapa yang dibangun di 2024 sudah ada. Jadi roadmap, pemenuhannya bertahap dan tidak semuanya 15 dibangun di satu tahun," jelas Ani.

Kata dia, pembangunan Puskesmas memang menjadi rencana strategis (Renstra) Pemerintah DKI. Seingat dia, pembangunan akan diselesaikan sampai 2026 mendatang. (faf)